

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Dalam bab III ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka selama penelitian di PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL). Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya akan disajikan dan dianalisa secara kualitatif dengan maksud agar analisa terhadap seluruh data tersebut dapat dijabarkan serta agar dipahami sehingga dapat menggambarkan realita di lapangan secara jelas dan tepat. Deskripsi data-data tersebut kemudian akan dianalisa untuk mengetahui implementasi kegiatan *community relations* PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan aktifitas perdagangan di lingkungan Bandara Internasional Lombok (BIL).

Pembahasan pada bab ini peneliti juga menjabarkan perencanaan kegiatan dikarenakan perencanaan tersebut merupakan bagian dari proses implementasi program. Alasan lain disebabkan pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) terutama bidang yang berurusan langsung dengan permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti *Airport Security Section Head, SMS, QM & CS Departement Head, General Affair and Comm Section Head* dan *Airport Services Section Head* harus melalui tahap perencanaan dalam proses implementasi sesuai instruksi *General Manager* PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL).

Selain itu, terdapat keterbatasan data yang dapat diperoleh peneliti dalam pembahasan pada penelitian ini dikarenakan pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) tidak secara berkelanjutan membuat *time table* program yang seharusnya dibuat sesuai dengan tujuan program jangka pendek ataupun jangka panjang. Ketika terjadi *reshuffle* atau pergantian kepengurusan internal PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) maka kepengurusan pengganti dari keanggotan yang lama tidak mendapatkan data secara menyeluruh. PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam menjalankan khususnya program *community relations* pada penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) hanya membuat program ketika merasa dibutuhkan atau ketika keadaan dirasa sudah tidak kondusif.

Keterbatasan lain dalam hal memperoleh data pada *stakeholder external* khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dikarenakan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut masih cenderung tertutup dan sensitif untuk memberikan informasi tentang permasalahan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di luar area relokasi yang telah disediakan oleh pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL).

Masyarakat Lingkar Bandara khususnya yang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) secara geografis terletak di daerah yang jauh dari lingkungan perkotaan dan masih memegang erat budaya sekitar. Pola pikir masyarakat tersebut masih cenderung tertutup terhadap segala sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Ketika terdapat hal-hal yang dianggap mengganggu atau tidak

sesuai dengan mereka, tidak jarang sifat arogan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sulit terkontrol, seperti konflik berdarah yang pernah terjadi sebelumnya.

Secara umum, untuk menyelesaikan permasalahan tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk program *community relations* selama periode Mei 2014 hingga Agustus 2016 khususnya terhadap masyarakat tiga Desa di Lingkar Bandara yaitu Desa Tanak Awu, Ketare dan Penujak yang terkena dampak secara langsung dari pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL). Adapun bentuk-bentuk program *community relations* yang telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) sebagai berikut :

Tabel 3.1 Program *Community Relations* PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok Periode Mei 2014 – Agustus 2016

NO	JENIS PROGRAM	BENTUK PROGRAM	TAHUN	KETERANGAN
1	Bina Lingkungan	Pemberian Bantuan Dana program Bina Lingkungan	2014	Pemberian bantuan dana program BL dilakukan sebanyak 2 kali pada tahun 2014 dengan total dana Rp 772.000.000 untuk setidaknya 56 penerima.
		Penyaluran Bantuan CSR Berupa Program Kesehatan Penyediaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	2014	Pemberian bantuan dana kesehatan pada program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk pengadaan MCK dilakukan hanya sekali pada tahun 2014 dengan rincian 483 unit untuk Desa Ketare dan 94 unit untuk Desa Tanak Awu dengan total dana Rp 45.000.000
		Penyaluran Beasiswa	2015	Total dana yang diberikan oleh AP BIL sejumlah Rp 25.000.000 untuk 62 siswa dan siswi tingkat SD, SMP

				dan SMA. Program bantuan dana beasiswa hanya sekali dilakukan pada tahun 2015.
		Pelaksanaan Program Puskesmas Keliling	2015	Program puskesmas keliling diikuti oleh setidaknya 326 masyarakat dari tiga Desa dengan total biaya Rp 58.000.000 yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam seminggu pada bulan Maret 2015.
		Buka Puasa Bersama dan Pemberian Santunan Anak Yatim	2016	Acara buka puasa bersama dilakukan hanya sekali pada tahun 2016 yang dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada 50 anak yatim dari Desa Tanak Awu, Penujak dan Ketara yang juga menyedot dana AP setidaknya Rp 21.000.000
		Pemberian Bantuan Sembako Menjelang Hari Raya	2016	Pemberian bantuan sembako gratis diberikan kepada masyarakat tiga Desa dengan total 450 paket sembako. Acara pemberian sembako gratis ini dilakukan sekali pada tahun 2016 dengan total anggaran sebesar Rp 13.000.000
		Pemberian Bantuan Dana Program Bina Lingkungan	2016	Program BL dilakukan sekali pada tahun 2016 dengan total anggaran sebesar Rp 350.000.000 untuk sektor pendidikan, sarana ibadah dan sarana umum. Dana tersebut terbagi untuk 16 sekolah, 4 Masjid, 1 Pura dan 6 kelompok masyarakat untuk pembangunan sarana umum.
		Layanan Kesehatan	2016	Program layanan kesehatan dilakukan sekali pada tahun 2016 yang diikuti oleh 117 balita, 15 ibu hamil dan 86 untuk lansia dengan total dana mencapai Rp 26.000.000
2	Relokasi	Pemindahan dan Pengawasan PKL ke area Relokasi	2014 hingga 2016	Proses pemindahan dan pengawasan terhadap PKL dilakukan setiap hari secara persuasif oleh AP dan PERMATA PETAK yang direncanakan hingga akhir tahun 2016. Biaya operasional dari kerjasama dengan PERMATA PETAK mencapai Rp 42.000.000 setiap bulan

A. PENYAJIAN DATA

A.1. Kegiatan *Community Relations* PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL)

A.1.1. Perencanaan

Implementasi kegiatan merupakan suatu proses menjalankan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Berkaitan dengan perencanaan tersebut perumusan perencanaan kegiatan *community relations* yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) berdasarkan hasil dari kesepakatan dan pendekatan secara persuasif yang telah disepakati oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan melibatkan masyarakat sekitar yang dikuatkan dengan penandatanganan MOU oleh tiga kepala Desa (lihat halaman 116) . Sebelum masuk ketahap pelaksanaan kegiatan, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) mengadakan rapat internal perusahaan yang juga melibatkan *stakeholder external* dalam hal ini masyarakat tiga Desa yaitu Tanak Awu, Ketara dan Penujak serta instansi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, pihak kepolisian dan Satpol PP. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk dapat membuat skala prioritas kegiatan yang perlu untuk dilaksanakan dan menjadi acuan utama kegiatan. Hasil dari pertemuan tersebut berfokus pada pengamanan dan upaya relokasi tempat Pedagang Kaki Lima (PKL).

Seperti yang disampaikan *General Affair and Comm Section Head* (Gede Eka Arisandi : 25 April 2016) Upaya awal yang dilakukan PT Angkasa Pura I sebagai berikut :

a. Upaya Pengamanan :

1. PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tahun 2011 mengadakan pertemuan guna mengandeng tokoh masyarakat yang dituakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan membentuk Tim pengamanan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bernama TIM 9, dalam pelaksanaan tim tersebut belum berhasil melaksanakan pengamanan terkait Pedagang Kaki Lima (PKL).¹
2. PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tahun 2013 mengkaji ulang TIM 9 (sembilan) dengan kembali mengundang tokoh masyarakat yang ada di sekitaran Bandara untuk menjadi TIM 15 dalam pelaksanaan belum juga mendapat hasilnya.
3. PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tahun 2014 mengadakan rapat guna meminta bantuan kepada pemerintah Tingkat II terkait pengamanan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam hal ini yang ditunjuk adalah satuan pengamanan pamong praja (SATPOL- PP) Lombok Tengah untuk mendampingi TIM 15 dalam pengamanan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Bandara Internasional Lombok (BIL) – Praya, hasil yang di peroleh belum maksimal.
4. PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tahun 2015 kembali mengundang untuk mengkaji ulang keberadaan TIM 15 dan bantuan pengamanan dari satuan pengamanan pamong praja

¹ Tim 9 dan Tim 15 merupakan susunan tim pengamanan yang dibentuk oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) yang direkomendasikan oleh Kepala Desa dari 3 Desa Lingkar Bandara. Penentuan keanggotaannya berdasarkan pengaruh dan elektabilitasnya dimata masyarakat tiga Desa.

(SATPOL – PP) Lombok Tengah ke Pengamanan Masyarakat yang melibatkan 3 (tiga) Desa lingkaran Bandara yang disebut dengan nama PERMATA PETAK, hasil yang dicapai dengan pengamanan masyarakat yang melibatkan 3 (tiga) Desa tersebut belum dapat melaksanakan tugas dengan baik hingga sekarang, hasil yang diperoleh masih belum maksimal;

b. Upaya Relokasi tempat :

1. PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) melakukan pendekatan dengan usaha kecil menengah (UKM) Kabupaten Lombok Tengah untuk penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Bandara Internasional Lombok Praya.
2. PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) melakukan pendekatan dengan usaha kecil menengah (UKM) Provinsi NTB untuk penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Bandara Internasional Lombok Praya.
3. PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) merelokasikan 2 (dua) tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) di Bandara Internasional Lombok Praya.
4. PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) menyerahkan pengelolaan kepada instansi yang ditunjuk oleh usaha kecil menengah (UKM) Kabupaten Lombok Tengah dan usaha kecil menengah (UKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai aturan yang

berada di PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL).

Sebelum melakukan penertiban dengan memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Area relokasi, pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) membentuk tim khusus sesuai surat keputusan *General Manager* Bandara Internasional Lombok (BIL) pada 31 April 2014

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN ATAU KAKI LIMA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK		
I. Pelindung		
1.	H.M. Suhaili FT.	Bupati Lombok Tengah
2.	Ir. Ridwan Syah, M.Sc., MM.	Kadishubinfo Prov. NTB
3.	AKBP Supriadi S.IK.	Kapolres Lombok Tengah
4.	H.M. Yusuf Saleh	Ketua DPRD Lombok Tengah
II. Pengarah		
	Pujiono	General Manager
III. Pelaksana		
1.	Ketua	: 1. Sudjud Muljadi 2. Supermin
2.	Koord. Seleksi Pedagang	: 1. Enggar Santoso 2. Riyaman 3. L. Dikjaya 4. L. Nudiana 5. L. Buntaran
3.	Koord. Penyediaan Fasilitas	: 1. Sutanto Wiyadi 2. Gani Wijaya
4.	Koord. Pelaksana Keterliban	: 1. M. Mardiah 2. I Kt. Dartha A. Pande
5.	Sekretaris	: Ahmad Danar Suryantono
6.	Anggota Koordinator Lapangan	: 1. Ipda. Daniel Ibi Lona, S.Sos. 2. Pelda Robani 3. Murti, S.H. 4. Wahyu G. Pitoyo 5. A. Amiruddin 6. Wayan Suparsa 7. Sumartono 8. Zuhair Marfadi 9. Misranedi 10. Umi Rochmawati
		SMS, QM & CS Dept. Head Airport Operation & Readiness Dept. Head Safety Health Env. Sect. Head Airport Fire Fighting & Rescue Sect. Head Kepala Desa Penujak Kepala Desa Tanak Awu Kepala Desa Ketara Airport Facilities Readiness Sect. Head Quality Manajemen Sect. Head Airport Security Sect. Head Airport Service Sect. Head Legal Officer Ka. Sub. Sektor BIL Tetua TNI AU BIL Rembiga Kepala Sat. Pol. PP Lombok Tengah Airport Duty Officer Airport Duty Officer Performance & Standar Team Leader Performance & Standar Security Officer Airlines Service Tim Leader Airlines Service Tim Leader Civil Airside Technician

Gambar : 3.1 Susunan Anggota TIM Penertiban PKL

(Sumber : Arsip PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok)

Kegiatan *community relations* yang dilakukan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) merupakan wujud tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga stabilitas serta keamanan dan segala bentuk kegiatan yang berada di lingkungan Bandara Internasional Lombok (BIL). Kegiatan-kegiatan *community relations* yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok

(BIL) difokuskan untuk masyarakat tiga Desa Lingkar Bandara yang sebagian besar berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Hasil dari proses perencanaan tersebut adalah pengembangan berbagai pilihan kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian pilihan kegiatan terbaik (paling memuaskan) diantara pilihan yang ada. Dalam hal ini oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) memfokuskan program utama untuk memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke area relokasi yang telah disediakan dan bekerjasama dengan Persatuan Masyarakat Tiga Desa (PERMATA PETAK) untuk proses pemindahan dan pengamanannya. Selain itu, pada tahap ini PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) telah dapat membentuk tim kepanitian dalam hal penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Lingkungan Bandara.

A.1.2. Implementasi

1. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

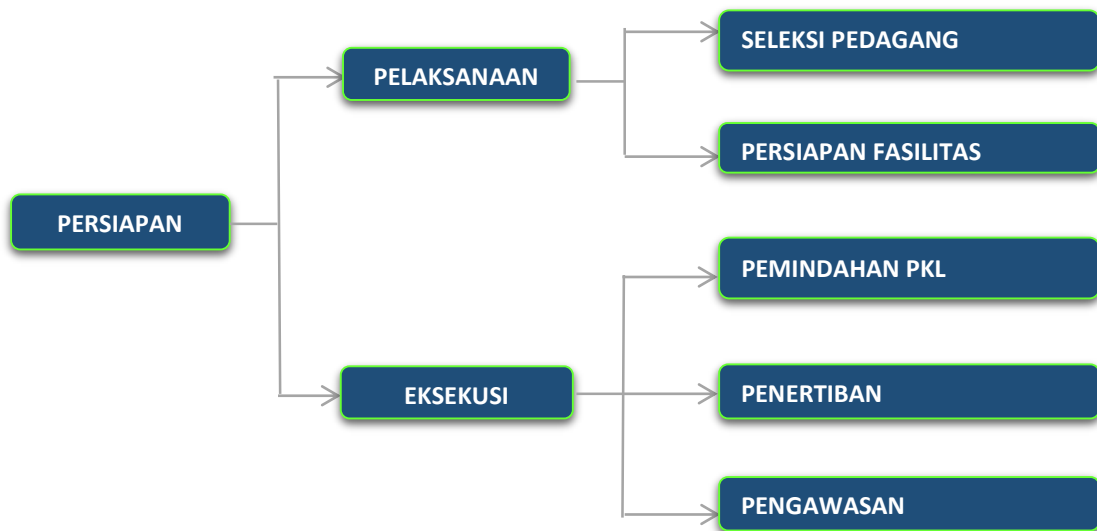
Setelah melalui tahap perencanaan dan mendapat persetujuan dari perusahaan, maka langkah selanjutnya ialah mengimplementasikan program-program tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Rencana yang baik tidak akan berarti dan berdampak apapun jika tidak diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan dalam hal ini PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) yang berusaha dalam upayanya menjalankan program *community relations* dalam hal penanganan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam proses implementasi program *community relations*, pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) memiliki pembagian kerja yang difokuskan untuk penanganan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan Bandara Internasional Lombok (BIL). Permasalahan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak hanya melibatkan satu divisi kerja saja, namun memiliki keterkaitan antara bidang kerja lainnya dalam internal perusahaan di PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL). Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Iwan Risdiyanto sebagai *CSR Section Head* mengenai wewenang dari perusahaan untuk mengelola program *community relations* oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tanggal 28 Oktober 2016 sebagai berikut :

“...Memang untuk masalah penanganan PKL disini kami melibatkan beberapa bidang kerja mas, tapi gak mesti semua *departement* yang ada di Angkasa Pura. Misalkan kita buat program, Pak GM udah oke ya kita langsung koordinasi dengan dinas terkait aja. Karena kita kerjanya langsung

di bawah BUMN mas. Kalau disini ya Pemkot, ya ke dinas aja langsung. Tapi kalau ada peresmian program, Bupati atau Gubernurnya mau dateng ya silahkan aja.

Program awal yang dilakukan setelah tahap perencanaan dan sudah diimplementasikan ialah penyediaan area relokasi untuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun bagan tahap penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai berikut :



Gambar 3.2 Tahap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

(Sumber : Arsip PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok)

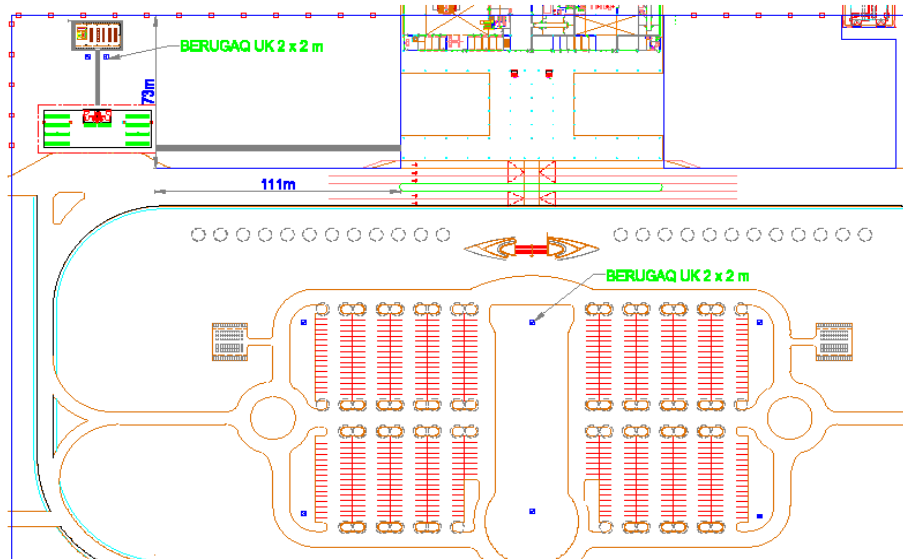
Dari bagan tersebut bisa dilihat bahwa dalam hal penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan Bandara Internasional Lombok (BIL) pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) membagi kegiatan relokasi yang merupakan bagian dari upaya implementasi kegiatan *community relations* ke dalam beberapa tahapan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya,

setelah melakukan tahap persiapan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) kemudian menjalankan tahap pelaksanaan kegiatan relokasi.

Seleksi Pedagang Kaki Lima (PKL) dimaksudkan agar setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang akan menempati area relokasi yang telah disediakan dapat terdata oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL). Karena sebelum sampai ketahap penertiban atau pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL), pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) merasa perlu untuk mengetahui jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang akan direlokasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sudjud Muliadi sebagai *Safety Management System, Quality Management & Costumer Service Departement* pada tanggal 13 Juli 2016.

‘...Area Relokasi sudah kita siapkan, tapi jumlahnya terbatas dan terbagi kedalam beberapa blok mas. Ada di bagian depan, samping dan belakang. Jadi kita perlu tau jumlah dan data PKL yang akan direlokasi biar tepat pembagiannya.

PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) mengaku telah menyediakan tempat yang layak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk dapat tetap berdagang di lingkungan Bandara Internasional Lombok (BIL). Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* dalam hal ini masyarakat tiga Desa Lingkar Bandara seperti yang terlihat pada gambar berikut :



Gambar 3.3 Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

(Sumber : Arsip PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok)

Adapun data Pedagang Kaki Lima (PKL) yang direlokasi sebagai berikut :

No	Nama	Asal Desa
1	L. Munawir Haris	Tanah Awu
2	Baiq Masniati	Tanah Awu
3	L. Zulkaidah	Tanah Awu
4	Inak Ety	Tanah Awu
5	Siti Mariam	Tanah Awu
6	Inak Bambang Supriadi	Tanah Awu
7	Hj. Raudatul Jannah	Ketara
8	Inak Nurullaily	Tanah Awu
9	Inak Cindrawati	Tanah Awu
10	Mamik Sugianto	Tanah Awu
11	Baiq Sumar	Tanah Awu
12	Inak Fauzan Khalik	Tanah Awu
13	Inak Sumarni	Tanah Awu
14	Inak Emin	Tanah Awu
15	Inak Brahim	Tanah Awu
16	Inak Erun	Tanah Awu
17	Inak Midi	Tanah Awu
18	Inak Oyun	Tanah Awu
19	Inak Hartini	Tanah Awu
20	Inak Ahyan	Tanah Awu
21	Inak Azwarhadi	Tanah Awu
22	Inak Ruly	Tanah Awu
23	Inak Karman	Tanah Awu
24	Inak Razak	Tanah Awu
25	Inak Ojan	Tanah Awu

26	Inak Along	Tanah Awu
27	Inak Atin	Tanah Awu
28	Ina Dini	Penujak
29	Inak Dani	Tanah Awu
30	Inak Habib/Emi	Tanah Awu
31	Inak Rani	Tanah Awu
32	Inak Paryah	Tanah Awu
33	Inak Awan	Tanah Awu
34	Inak Novaizah	Tanah Awu
35	Inak Ipe	Tanah Awu
36	Inak Nuri	Tanah Awu
37	Inak Supadi	Tanah Awu
38	Inak Iwik	Tanah Awu
39	Inak Reza	Tanah Awu
40	Nurhasanah	Tanah Awu
41	Inak Mendan	Tanah Awu
42	Inak Kartini	Tanah Awu
43	Inak Selamat	Tanah Awu
44	Inak AS	Tanah Awu
45	Inak Sape	Tanah Awu
46	Inak Oppa	Tanah Awu
47	Inak Wulan	Tanah Awu
48	Inak Uli	Tanah Awu
49	Inak Sarbini	Tanah Awu
50	Inak Pane	Tanah Awu
51	Inak Andhi	Tanah Awu
52	Inak Keng	Tanah Awu
53	Hany rnurnijah	Tanah Awu
54	Inak Wani	Tanah Awu
55	Inak Tiyah	Tanah Awu
56	Inak Zuni	Tanah Awu
57	Inak Rah	Tanah Awu
58	Mamiek R	Tanah Awu
59	Inak Bani	Tanah Awu
60	Inak Hj. Pandini	Tanah Awu
61	Inak Nurasian	Tanah Awu
62	Inak Rajab	Tanah Awu
63	Inak Jepun	Tanah Awu
64	Inak Ulul	Tanah Awu
65	Inak Sera	Tanah Awu
66	Inak Saiful	Tanah ubu
67	Inak Fuat	Penujak
68	Inak Santi	Tanah Awu
69	Inak sinar	Tanah Awu

70	Inak Udin	Tanah Awu
71	Inak Safar	Tanah Awu
72	Inak Nazar	Tanah Awu
73	Inak Serapah	Tanah Awu
74	Mamik Ami	Tanah Awu
75	Inak Dijah	Tanah Awu
76	Inak Dini	Desa Ketara
77	Inah Saudah	Tanah Awu
78	Inak Eko	Desa Ketara
79	Inak Dading	Desa Ketara
80	M. Tony	Desa Ketara
81	Dayah/Nuri	Tanah Awu
82	Rifqi	Desa Ketara
83	Inak Ida	Desa Ketara
84	Inak Jihan	Desa Ketara
85	Hj Rini	Desa Ketara
86	Amak Anto	Tanah Awu
87	Atep	Tanah Awu
88	Sahab	Tanah Awu
89	Mes	Tanah Awu
90	Sadri	Tanah Awu
91	Hj. Nurdin	Tanah Awu
92	Inak Taman	Ketara
93	Inak Wire	Ketara
94	Inak Leha	Tanah Awu
95	Inak Rabik	Ketara
96	Inak Ketun	Tanah Awu
97	Inak Datul	Tanah Awu
98	Haji Nir	Tanah Awu
99	Inak Nila	Tanah Awu

Asal Desa	Jumlah
Tanah Awu	85
Ketara	12
Penujak	2

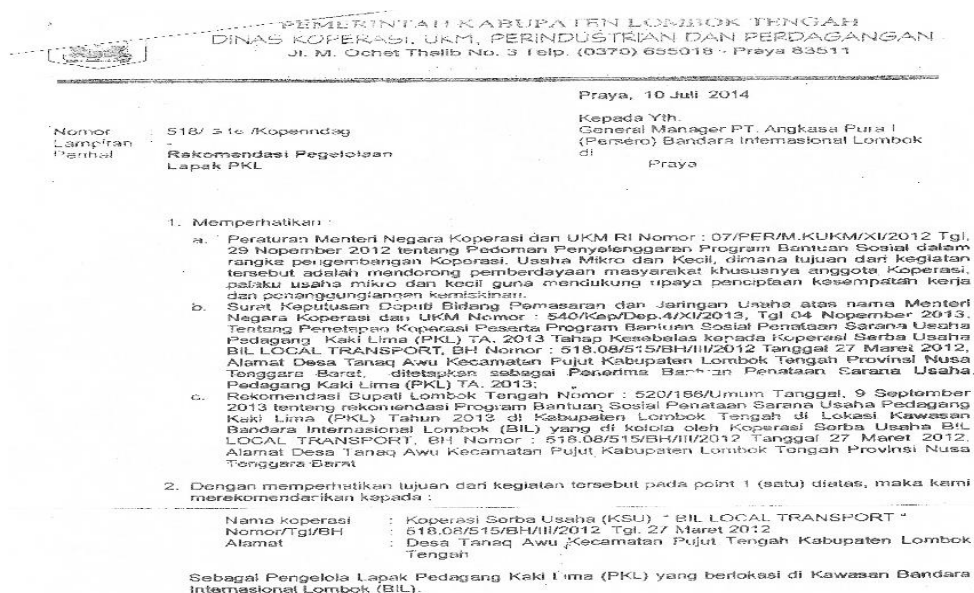
Tabel 3.2 Data Pedagang Kaki Lima (PKL) di Area Relokasi Bandara Internasional Lombok (BIL) pada Bulan Mei 2014

(Sumber : Arsip PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok)

Dari data yang diperoleh peneliti, terlihat total Pedagang Kaki Lima (PKL) yang direlokasi oleh pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional

Lombok (BIL) mayoritas merupakan masyarakat Desa Tanak Awu dengan 85 orang, Desa Ketara 12 orang, sedangkan masyarakat Desa Punujak hanya terdapat 2 orang Pedagang Kaki Lima (PKL).

Selain itu, program relokasi tersebut dikuatkan dengan surat Rekomendasi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang juga bekerjasama dengan Koperasi Serba Usaha Kecil (KSU) yang beralamat di Desa Tanak Awu sebagai pengelola lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berlokasi di kawasan Bandara Internasional Lombok.



Gambar 3.4
Surat Rekomendasi Pengelolaan Lapak PKL 10 Juli 2014

(Sumber : Arsip PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok)

Surat rekomendasi yang juga melibatkan beberapa instansi seperti Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Provinsi Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala

Dinas UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Marketing & Business Development Director PT Angkasa Pura (persero) serta Pengurus KSU “BIL Local Transport” Desa Tanak Awu bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya menciptakan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

2. Bina Lingkungan

Selain relokasi yang merupakan program *community relations*, pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) juga melakukan kegiatan bina lingkungan dalam upayanya memperbesar akses masyarakat khususnya masyarakat Desa Lingkar Bandara Internasional Lombok (BIL) yang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam bidang ekonomi dan sosial. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi Angkasa Pura I melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan dan bersifat hibah. Cakupan kegiatan Program Bina Lingkungan meliputi pemberian bantuan untuk Bencana Alam, Pendidikan dan/atau Pelatihan, Peningkatan Kesehatan, Sarana dan Prasarana Umum, sarana ibadah, pelestarian alam, bantuan sosial masyarakat dalam rangka penuntasan kemiskinan dan bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi serta bentuk lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan program kemitraan.

Disamping program-program tersebut terdapat program bantuan yang pelaksanaannya didasarkan pada intruksi Kementerian BUMN yang dinamakan BUMN Peduli. Bantuan Bina Lingkungan telah memberikan kontribusi besar bagi

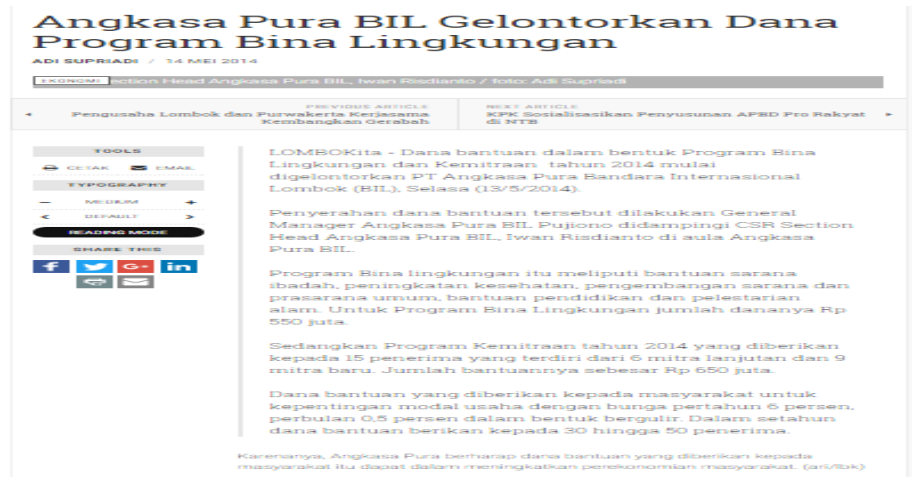
peningkatan kehidupan masyarakat serta kemajuan dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, keagamaan, prasarana umum, pelestarian alam dan bantuan bencana alam. Komitmen Perusahaan dalam pemenuhan aspek sosial terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah keterlibatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lokasi bandar udara berada. Hal tersebut diwujudkan Perusahaan dalam bentuk pelaksanaan Program Bina Lingkungan, yakni program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dan peningkatan kualitas hidup (Angkasa Pura : 2013).

Sedangkan untuk mengetahui program yang dijalankan sudah tepat sasaran atau tidak, *CSR Section Head* secara langsung akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait yang terlibat dalam program. Seperti yang dijelaskan berdasarkan hasil *interview* pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Bapak Iwan Risdiyanto sebagai *CSR Section Head* mengenai peninjauan program *community relations* oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) sebagai berikut :

“...Sejauh ini alhamdulillah lancar-lancar aja, karna setiap kita kasi bantuan misalnya beasiswa ya kita langsung tanya aja ke sekolahnya. Sama juga dengan bantuan kesehatan, koordinasinya langsung ke dinas kesehatan jadi ya gak ada masalah dan tepat sasaran. Untuk program-program lain ya sama juga, kita langsung ke instansi terkait.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan *community relations* dalam program Bina Lingkungan yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) antara lain sebagai berikut :

1. Pemberian Dana Bina Lingkungan pada Bulan Mei 2014



Gambar 3.5
Program Bina Lingkungan 13 Mei 2014

(Sumber : Lombokita.com)

PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) selaku pengelola Bandara Internasional Lombok (BIL) terus berupaya memperhatikan warga masyarakat di tiga desa khususnya yang berada di sekitar kawasan Bandara. PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) memberikan bantuan kepada masyarakat Lingkar Bandara dalam program bina lingkungan pada hari Selasa bulan Mei 2014. Program Bina Lingkungan tersebut meliputi bantuan sarana ibadah dengan merenovasi masjid-masjid, peningkatan kesehatan (pemberian bantuan obat-obatan), pengembangan sarana dan prasarana umum (perbaikan akses jalan desa), bantuan pendidikan (pemberian bantuan beasiswa) dan pelestarian alam seperti penanaman pohon. Sebagai bentuk komitmen, untuk Program Bina Lingkungan ini total biaya yang dikeluarkan oleh PT

Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) sebesar Rp 550 juta untuk 39 penerima ditiga Desa. Dana tersebut disalurkan untuk masyarakat ditiga desa, yakni Desa Ketare, Desa Penujak dan Desa Tanak Awu. Penyerahan dana bantuan tersebut diberikan oleh *General Manager* PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok (BIL) Pujiono yang didampingi *CSR Section Head* Angkasa Pura BIL, Iwan Risdianto di aula Angkasa Pura Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok (BIL).

Program Bina Lingkungan pada dasarnya sudah pernah dilakukan bahkan sebelum proses relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) berjalan. Namun fokus pemberian bantuan saat ini diakui oleh pihak PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok (BIL) sebagai salah satu upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Lingkar Bandara khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL), walaupun efektifitas program kegiatan belum terlihat perubahan yang signifikan. Oleh karenanya pihak PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok (BIL) akan terus menjalankan program yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut *General Manager* PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok (BIL) menyampaikan bahwa kegiatan pemberian dana bantuan Bina Lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang berada di kawasan Lingkar Bandara.

“... Bantuan ini merupakan bentuk komitmen dan semangat Angkasa Pura *Airports* dalam turut ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap, masyarakat bisa merasakan langsung dampak keberadaan Bandara ini.

Program Bina Lingkungan ini merupakan program pertama yang dijalankan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) setelah relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) periode Mei 2014. Selain itu, dalam program bantuan ini, perusahaan menyalurkan sebagian keuntungan perusahaan untuk ikut berperan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Target dari program ini adalah agar perusahaan mampu secara nyata memberikan bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat sebagai salah satu *stakeholder externalnya* dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah Bandara Internasional Lombok (BIL) juga dapat merasa terbantu, yang efeknya diharapkan dapat mempererat hubungan antara masyarakat dan perusahaan.

2. Penyaluran Bantuan CSR Berupa Program Kesehatan Penyediaan STBM



Gambar 3.6
Program Kesehatan Penyediaan STBM 17 Desember 2014

(Sumber : Lomboktoday.co.id)

Pada tanggal 17 Desember 2014 PT. Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok (BIL) menyalurkan dana program *Coorporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat lingkaran Bandara Internasional Lombok (BIL), di Dusun Selak Daye Desa Ketare Kecamatan Pujut.

Program bantuan tersebut merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam bentuk penyediaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk masyarakat desa Ketare dan Tanak Awu.

Yandi Riswan selaku *Finance and IT Departement Head* Bandara Internasional Lombok (BIL), menjelaskan bahwa dana program *Coorporate Social Responsibility* (CSR) tahun 2014 difokuskan untuk pembangunan sarana kebersihan dan kesehatan masyarakat, khususnya beberapa desa yang ada di sekitar Bandara Internasional Lombok (BIL). Selain itu, program tersebut juga diperuntukkan untuk pembangunan Pos Kesehatan Hewan di Desa Tanak Awu dan pembangunan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Ketare. Khususnya untuk pembangunan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ini, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) menyiapkan sebanyak 483 unit kepada desa Ketare dan sebanyak 94 unit kepada Desa Tanak Awu dengan jumlah dana sebesar Rp 45.000.000 untuk pembuatan MCK (mandi, cuci, kakus) masyarakat.

MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah. Potret masyarakat seperti itu biasanya kurang menyadari arti penting dari fungsi MCK. Selain itu, MCK merupakan sarana yang menunjang kehidupan sosial, budaya serta kesehatan masyarakat. MCK yang sehat akan mencerminkan lingkungan yang sehat, bersih serta tertata yang juga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan. Dampak positif bagi masyarakat terhadap keberadaan MCK yang baik adalah perubahan perilaku, kebiasaan serta budaya manusia di lingkungan umum yang akan menjadi lebih baik pula.

Pentingnya keberadaan MCK bagi masyarakat Lingkar Bandara khususnya pada masyarakat Desa Ketare disadari dengan baik oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) agar permasalahan masyarakat desa Ketare yang sebelumnya belum mempunyai jamban, tempat untuk mencuci dan kamar mandi yang layak akan segera teratasi, sehingga masyarakat dapat kesehatan masyarakat Desa Ketare dapat terjaga dengan baik.

Pemberian bantuan program *Coorporate Social Responsibility* (CSR) tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk ikut membangun dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini sekaligus untuk menghapus segala

image yang kurang baik masyarakat terhadap keberadaan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Lombok Tengah.

Masyarakat menyambut baik terhadap bantuan yang diberikan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL). Masyarakat juga mengucapkan terimakasih kepada PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) karena telah mau peduli untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Desa Ketare melalui program bantuan STBM. Kepala Desa Ketare menyampaikan bahwa dengan adanya bantuan program *Coorporate Social Responsibility (CSR)* STBM ini, pada tahun 2015 mendatang warga Desa Ketare tidak akan ada yang membuang air besar disembarang tempat, karena saat ini masyarakat sudah memiliki jamban sendiri.

Sementara itu, acara yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, dr. Nurhandini Eka Dewi menjelaskan, program STBM ini sangat berguna bagi masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jika program STBM dapat berjalan dengan baik, maka Desa Ketare diharapkan akan dapat menjadi pelopor masyarakat desa yang tidak membuang air besar secara sembarangan, khususnya bagi masyarakat lingkaran Bandara.

Acara pemberian bantuan program *Coorporate Social Responsibility (CSR)* STBM tersebut ditutup oleh pernyataan dari Bupati Lombok Tengah HM Suhaili Fadil Tohir yang mengharapkan agar

masyarakat penerima bantuan dapat menjaga, memelihara dan memanfaatkan fasilitas MCK yang telah diberikan, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas diberikannya program bantuan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL).

3. Pemberian Bantuan Dana Program Bina Lingkungan Desember 2014



Gambar 3.7
Program Bina Lingkungan 18 Desember 2014

(Sumber : Lomboktoday.co.id)

PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) kembali menyalurkan dana program Bina Lingkungan kepada masyarakat di beberapa Desa yang berada di lingkaran Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan total dana sejumlah Rp 272 juta. Melalui *Head Section* CSR PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) Program Bina Lingkungan tersebut meliputi bantuan sarana ibadah, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan pendidikan dan pelestarian alam. Program Bina Lingkungan yang disalurkan kali ini, diberikan kepada 17 penerima. Jadi, dari awal tahun 2014 hingga Desember penyaluran dana program Bina Lingkungan yang sudah disalurkan oleh PT

Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) menghabiskan dana dengan total sekitar Rp 900 juta.

Penyaluran dana program Bina Lingkungan ini merupakan bentuk kepedulian PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap masyarakat Lombok Tengah. Karena itu, pihaknya sangat berharap kepada masyarakat yang ada di lingkaran Bandara Internasional Lombok (BIL) khususnya untuk bersama-sama mendukung keberadaan Bandara Internasional Lombok (BIL) ini. Sehingga, apa yang diharapkan oleh semua pihak, baik itu PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL), Pemda dan masyarakat Lombok Tengah bisa tercapai sesuai harapan. Dengan adanya dana program Bina Lingkungan yang diberikan kepada masyarakat ini, diharapkan agar masyarakat bisa memiliki kesadaran dan tanggungjawab akan pentingnya keberadaan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Lombok Tengah. Masyarakat juga diharapkan supaya bisa menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban guna mendukung keberadaan Bandara Internasional Lombok (BIL) (Lomboktoday : 2014).

Program-program *community relations* dalam bentuk kegiatan Bina Lingkungan dengan biaya yang tidak sedikit menunjukkan keseriusan PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di kawasan Lingkaran Bandara agar bersama-sama merasa menjaga keamanan dan ketertiban Bandara Internasional Lombok dengan masyarakat Lingkaran Bandara tidak lagi

menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di luar area yang telah disediakan.

4. Penyaluran Beasiswa Februari 2015



Gambar 3.8



Gambar 3.9

Penyaluran Beasiswa Tiga Desa pada 20 Februari 2015

(Sumber : Angkasapura1.co.id)

Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, dengan adanya pendidikan kita dapat mengetahui berbagai macam informasi dan menjadi pribadi mandiri yang juga dapat memajukan perekonomian daerah. Di Indonesia masih terdapat banyak masalah-masalah dalam dunia pendidikan, khususnya daerah-daerah pedesaan yang jauh dari lingkungan perkotaan tanpa terkecuali daerah sekitar kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL).

Permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di daerah terpencil dapat menghambat proses pendidikan yang diantaranya disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, peralatan-peralatan sekolah yang menunjang proses belajar mengajar, kualitas tenaga didik serta biaya pendidikan yang bagi sebagian masyarakat di daerah pedesaan seperti

kawasan lingkaran Bandara Internasional Lombok (BIL) masih mengalami kesulitan hingga tidak jarang anak-anak tersebut putus sekolah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada tanggal 20 Februari 2015, PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) memberikan bantuan beasiswa dengan total sebesar Rp. 25.000.000 kepada 62 siswa dan siswi tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Penujak, Desa Ketara dan Desa Tanak Awu. Nilai beasiswa untuk tingkat SD sebesar Rp. 300.000/orang tingkat SMP sebesar Rp. 400.000/orang dan tingkat SMA sebesar Rp. 500.000/orang.

Kegiatan *community relations* dengan memberikan bantuan beasiswa kepada siswa siswi anak-anak yang berada di kawasan lingkaran Bandara merupakan salah satu bentuk kepedulian PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam hal peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sekitar. Target dari penyaluran dana beasiswa tersebut diharapkan anak-anak Lingkaran Bandara akan tumbuh dan berkembang menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, masyarakat lingkaran Bandara tidak perlu lagi menggantungkan hidupnya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan Bandara Internasional Lombok (BIL) melainkan dapat menjadi pekerja profesional yang akan memajukan lingkungannya sendiri. Selain itu, kegiatan bantuan seperti ini dapat memupuk serta mempererat ikatan antara PT Angkasa Pura I Bandara

Internasional Lombok (BIL) sebagai perusahaan pengelola Bandara dan masyarakat sebagai *stakeholdernya*.

5. Pelaksanaan Program Puskesmas Keliling Maret 2015



Gambar 3.10

Gambar 3.11

Program Puskesmas Keliling pada Bulan Maret 2015

(Sumber : Angkasapura1.co.id)

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografis dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja Puskesmas.

Sedangkan puskesmas keliling merupakan tim pelayanan kesehatan Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda, peralatan kesehatan dan peralatan komunikasi yang berasal dari Puskesmas. Puskesmas keliling berfungsi menunjang dan membantu kegiatan pelaksanaan program Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau atau sulit dijangkau oleh sarana kesehatan seperti kawasan yang berada di area Lingkar Bandara Internasional Lombok (BIL).

Adapun tujuan umum dari Puskesmas keliling tersebut ialah menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dengan pelayanan jemput bola. Sedangkan tujuan khususnya antara lain melakukan identifikasi insiden suatu penyakit di masyarakat, melaksanakan pelayanan sedekat mungkin dengan masyarakat terutama masyarakat di wilayah terpencil, mengoptimalkan pelayanan terpadu dengan keterlibatan petugas yang berkompeten di bidangnya dan lain sebagainya

Khusus Program Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) yang juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dan didukung oleh 3 (tiga) Puskesmas, yaitu Puskesmas Sengkol, Puskesmas Penujak dan Puskesmas Batunyala dalam hal penyediaan obat-obatan dan tenaga medis, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 orang dokter dan bidan
- b. 1 orang perawat

- c. 1 orang farmasi atau apoteker
- d. 2 orang kader posyandu

Waktu pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Keliling oleh PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) pada bulan Maret 2015 sebanyak 4 kali seminggu secara periodik, pukul 09.00 s/d selesai.

Dalam kegiatan tersebut diberikan penyuluhan kepada masyarakat Lingkar Bandara mengenai kesehatan ibu dan anak oleh petugas Puskesmas dan pemaparan Program Pelayanan Kesehatan Keliling oleh perwakilan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL). Hingga akhir bulan Maret 2016, setidaknya tercatat 326 masyarakat tiga Desa lingkar Bandara yang mengikuti program puskesmas keliling.

Melalui SMS, QM & CS PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok (BIL) Bapak Sudjud Muliadi menyampaikan bahwa kegiatan program puskesmas keliling tersebut untuk sementara hanya terfokus pada ibu hamil dan balita yang berada di kawasan Lingkar Bandara Internasional Lombok (BIL).

“... Sasaran utama dari program Puskesmas keliling ini adalah untuk menjangkau masyarakat disekitar wilayah Bandara yang belum mempunyai posyandu sehingga diharapkan masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Program ini untuk sementara dikhususkan bagi ibu hamil, bayi dan balita. Masyarakat juga antusias mengikuti program ini, bisa kita lihat dari ratusan masyarakat yang ikut terlibat. Ya kalau untuk dana gak kurang dari 58 juta kita keluarkan.

Namun tidak menutup kemungkinan program puskesmas keliling tersebut selanjutnya akan dapat menjangkau lebih banyak lagi lapisan masyarakat yang berada di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL).

Sehingga hasil yang didapatkan dari program puskesmas keliling akan lebih optimal.

6. Buka Puasa Bersama Juni 2016

Buka Puasa Bersama General Manager dan Stakeholder Lombok International Airport



Gambar 3.12
Buka Puasa Bersama 24 Juni 2016

(Sumber : lombok-Airport.co.id)

Mendapat keberkahan di bulan yang penuh berkah serta semangat berbagi dalam nuansa Ramadhan menjadi latar belakang PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) menggelar acara Buka Puasa dan terawih bersama *General Manager* dan *Stakeholder* beserta Anak Yatim, yang diadakan pada 24 Juni 2016 (18 Ramadhan 1437 H) di Gedung *Airport Fire Fighting & Rescue Section*. Kegiatan Buka Puasa Bersama dimulai pukul 17.00 WITA dengan diawali sambutan dari I Gusti Ngurah Ardita selaku *General Manager* Lombok International Airport.

“... Tujuan dilaksanakan acara buka bersama ini selain untuk menjalankan ibadah bersama dalam meningkatkan iman, juga meningkatkan kebersamaan, silaturahmi dan sinergisitas kita. Santunan yang kami berikan merupakan bentuk kepedulian terhadap anak-anak yatim. Setidaknya kami ingin berbagi dengan anak-anak yang kurang beruntung.

Kegiatan buka bersama ini juga dihadiri oleh Ibu Yudhi Sari Sitompul selaku Direktur Bandara Ditjen Perhubungan Udara beserta tim, Komandan KOREM 162 / WB, Komandan KODIM 1620 Lombok Tengah dan *Airport Operation Committee* Bandara Internasional Lombok (BIL).

Tujuan dilaksanakan acara buka bersama tersebut selain untuk menjalankan ibadah dalam rangka meningkatkan iman, kebersamaan, serta silaturahmi dan sinergisitas antara masyarakat Lingkar Bandara dan PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) serta *stakeholder* lainnya, acara ini juga diselenggarakan guna memberi santunan terhadap sesama dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan..

Selain buka puasa bersama, dalam kesempatan kali ini PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) juga menyalurkan santunan kepada 50 (lima puluh) anak yatim dari Yayasan Al Mukaromah yang merupakan anak-anak dari Desa Tanak Awu, Penujak dan Ketara yang diberikan secara simbolik oleh *General Manager* Bandara Internasional Lombok (BIL). Adapun total dana yang diberikan oleh PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam kegiatan ini mencapai Rp 21 juta. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Tausiyah oleh T.G.H. L. Supardan Khalil S. Ag dan pembacaan doa sebelum berbuka puasa bersama. Kegiatan tersebut disambut dengan baik oleh *stakeholder* dan masyarakat Lingkar Bandara khususnya.

Acara buka puasa bersama ini diadakan sebagai ajang silaturahmi antara PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap

komunitas Bandara dan pihak *eksternal* yang telah banyak membantu kegiatan operasional di antara PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL). Target dari program buka bersama ini adalah terlaksananya penyaluran dana buka puasa bersama tepat sasaran dan terjalinnya tali Ukhuwwah Islamiyyah antara PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan masyarakat Lingkar Bandara.

7. Pemberian Bantuan Sembako Menjelang Hari Raya Juli 2016



Gambar 3.13
Pemberian Bantuan Sembako Menjelang Hari Raya 1 Juli 2016
(Sumber : lombok-Airport.co.id)

Pada tanggal 1 Juli 2016 PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) melaksanakan program bantuan sembako gratis di ruang Rinjani pukul 15.20 WITA. Sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) paket sembako dengan total anggaran Rp 13 juta yang dibagikan kepada warga sekitar Lingkar Bandara yang kurang mampu. Acara pembagian sembako dibuka oleh Yandi Riswan selaku *Finance & IT Departement Head* yang mewakili *General Manager* Bandara Internasional Lombok (BIL).

“...Melalui program PKBL pemberian Paket Sembako Ramadhan 1437 H merupakan program rutin yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan kami mengharapkan pemberian sembako ini tidak dilihat dari jumlah nilainya tetapi dari keikhlasan kami untuk berbagi dengan masyarakat sekitar Bandara.

Pemberian sembako gratis melalui program Bina Lingkungan tersebut merupakan program rutin yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) dan target program ini diharapkan dari pemberian sembako tersebut dapat membantu masyarakat Lingkar Bandara khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Pemberian paket sembako diberikan secara simbolis oleh manajemen PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) yang diwakili oleh 2 (dua) orang dari masing-masing Desa, kemudian akan diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat Lingkar Bandara sehari setelah kegiatan tersebut berlangsung.

Program Ramadhan Karim dengan kegiatan pemberian bantuan paket sembako gratis ini merupakan kegiatan rutin tahunan menjelang hari raya Idul Fitri, yang dilakukan oleh unit *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) dan juga merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan di sekitar area perusahaan dengan harapan melalui kegiatan ini dapat mempererat hubungan kekeluargaan antara PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan masyarakat yang berada di sekitar area Bandara Internasional Lombok (BIL).

Melalui Kepala Desa Penujak L. Dikjaya, masyarakat mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian manajemen PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) karena dengan pemberian sembako gratis ini, akan sedikit mengurangi beban masyarakat terutama yang tidak mampu menjelang Hari Raya Idul Fitri (lombok-Airport : 2016).

8. Penyaluran Dana Bina Lingkungan Juli 2016



Gambar 3.14
Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahap 1 pada 21 Juli 2016

(Sumber : lombok-Airport.co.id)

PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) kembali menyalurkan bantuan Bina Lingkungan kepada warga Lingkar Bandara. Bantuan ini diberikan untuk dapat membantu masyarakat lemah seperti bantuan sosial tempat ibadah dan lembaga pendidikan.

Pada hari Rabu 21 Juli 2016 PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) melaksanakan acara Penyaluran Dana Bina

Lingkungan tahap I tahun 2016. Acara penyaluran dana bina lingkungan ini dimulai pukul 14.00 WITA bertempat di Ruang Rinjani kantor Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dan dibuka oleh I Gusti Ngurah Ardita selaku *General Manager*.

“...Penyaluran program bina lingkungan kepada masyarakat ini merupakan bentuk kepedulian PT Angkasa Pura I BIL terhadap masyarakat. Total bantuan modal bina lingkungan yang sudah kita salurkan sejak tahun 1996 sebanyak Rp 8,7 miliar.

Target dari bantuan Bina Lingkungan tersebut, seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar Lingkungan Bandara agar bersama-sama dapat menjaga keamanan dan kenyamanan Lingkungan Bandara Internasional Lombok (BIL). Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan adanya Bandara ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) juga menambahkan bahwa dengan adanya penyaluran bantuan ini, PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) akan terus memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan pihak Bandara dan masyarakat dalam bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan terpenuhi. Sehingga bisa dirasakan bersama-sama manfaatnya.

Pada pelaksanaan pemberian bantuan Bina Lingkungan yang merupakan salah satu bentuk kegiatan *community relations* tersebut, PT

Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) menyalurkan dana untuk Program Bina Lingkungan Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp. 350.000.000 untuk sektor pendidikan, sarana ibadah dan sarana umum. Dana tersebut terbagi untuk 16 sekolah, 4 Masjid, 1 Pura dan 6 kelompok masyarakat untuk pembangunan sarana umum.

Pelaksanaan Program Bina Lingkungan didasari oleh Peraturan Menteri BUMN nomor : PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 serta Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) nomor : KEP.22/KU.13/2015 tanggal 17 Februari 2015 (lombok-Airport : 2016).

Acara ditutup pukul 14.30 WITA dengan penyerahan secara simbolis kepada SDN 1 Batujai Lombok Tengah dan Masjid Nurul Iman Dusun Embung Rungkas Ketare Lombok Tengah serta foto bersama dengan semua penerima Dana Bantuan Program Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) Tahap I Tahun 2016.

9. Layanan Kesehatan

LAYANAN KESEHATAN KE DUSUN PENYAMBI

08 Agustus 2016 14:08:00

Humas

Dibaca : 84 kali

Loteng(8/8) PT. Angkasa Pura I (Persero) LombokInternational Airport kali ini mengunjungi Dusun Penyambi Desa PengemburKecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat sekitar. Layanan kesehatan gratis ini merupakan bukti kepedulian terhadap masyarakat terutama untuk wilayah sekitar bandara. Kegiatan ini dibantu oleh pihak Puskesmas Sengkol sebagai tenaga ahli medis dan Duta Bandara 2016 Lombok International Airport. Kegiatan layanan kesehatan gratis dimulai pukul 09.00 WITA bertempat



Gambar 3.15

Layanan Kesehatan di Dusun Penyambi 8 Agustus 2016

(Sumber : lombok-Airport.co.id)

PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) memberikan layanan kesehatan gratis yang diperuntukan untuk balita, ibu hamil dan lansia. Selain pemeriksaan kesehatan secara gratis, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) juga menyediakan vitamin A, obat cacing, satu kotak susu dan biskuit untuk setiap balita. Ibu hamil juga mendapatkan susu khusus ibu hamil dan obat penguat janin sedangkan lansia diberikan obat serta bubur sum-sum. Selain itu PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) juga menyediakan pelayanan pemeriksaan kesehatan mata, mulut dan gigi.

Kegiatan layanan kesehatan gratis tersebut dilakukan di Dusun Penyambi Desa Ketare Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Layanan kesehatan gratis ini merupakan bukti kepedulian PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap masyarakat terutama untuk wilayah sekitar Bandara. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) yang dibantu oleh pihak Puskesmas Sengkol sebagai tenaga ahli medis dan Duta Bandara 2016 Bandara Internasional Lombok (BIL). Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA bertempat disalah satu rumah di Dusun Penyambi pada 8 Agustus 2016.

Antusias masyarakat terhadap kegiatan layanan kesehatan tersebut sangat tinggi terlihat dari jumlah masyarakat yang datang mencapai 117 untuk balita, 15 untuk ibu hamil dan 86 untuk lansia dengan total biaya untuk program ini mencapai Rp 26.000.000. Target program ini adalah untuk

dapat membantu masyarakat sekitar agar lebih termotivasi menjalani pola hidup sehat, melakukan pencegahan penyakit dan memahami tindakan yang perlu dilakukan saat kondisi darurat.

Melalui *General Manager* PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL), kegiatan serupa akan terus dilakukan salah satunya adalah Program menambahkan bantuan mobil puskesmas keliling. Mobil yang sudah dimodifikasi tersebut nantinya akan menyambangi masyarakat dan akan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, utamanya untuk melayani ibu hamil.

Kendaraan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh setiap puskesmas sebagai kendaraan dinas Puskesmas Keliling, karena sudah didukung dengan peralatan kesehatan yang sesuai dengan standar puskesmas keliling. Namun, juga dapat digunakan sesuai fungsi ambulans seperti umumnya, seperti menjemput dan mengantar pasien darurat.

Selain itu, pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan upaya mewujudkan keterlibatan perusahaan untuk ikut serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, serta semoga dapat menginspirasi perusahaan lain untuk turut peduli dan berkontribusi kepada masyarakat. PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) juga berharap bantuan tersebut dapat membantu pelayanan kesehatan di Lingkungan

Bandara Internasional Lombok (BIL), serta memupuk kemitraan antara perusahaan dan pemerintah.

A.1.3. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengusahakan dan melihat implementasi kegiatan yang sedang berjalan apakah sudah sesuai dengan rencana atau sebaliknya. Jika implementasi kegiatan tidak sesuai dengan rencana, maka pengawas kegiatan wajib menegur, merubah atau meluruskan kembali alur pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Manullang pengawasan merupakan proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilakukan, menilai kegiatan tersebut dan mengoreksinya bila diperlukan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana (Iriantara, 2004 : 138). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Kurma sebagai *Airport Security Section Head* PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tanggal 19 April 2016 sebagai berikut :

“... Hampir setiap hari kami melakukan pembinaan kepada mereka. Namun realitanya, tempat yang ada tidak ditempati malah dijadikan bedeng-bedeng kumuh diisi jemuran sehingga tampak jorok dan mereka belum mampu yang namanya menjaga kebersihan, memang semua ini harus diikuti oleh peran serta dari pemerintah daerah.

Dari pernyataan diatas, dapat diartikan bahwa PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) telah melakukan upaya pengawasan secara persuasif, bahkan terbilang intensif dalam hal penanganan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Namun pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) juga menyadari bahwa untuk dapat mengawasi perkembangan Pedagang

Kaki Lima (PKL) dibutuhkan adanya arsip data yang lengkap agar pengambilan tindakan selanjutnya dapat berjalan optimal. Seperti yang disampaikan Bapak Sudjud Muliadi sebagai *SMS, QM & Costumer Service Departement* pada tanggal 13 Juli 2016 sebagai berikut :

“...ya ini susahnya mas, seharusnya disini ada arsip setiap tahunnya mengenai PKL, jadi kalau ada mahasiswa yang datang kita bisa langsung kasi. Masalahnya setiap ada pergantian jabatan di Angkasa Pura ya gak dibuat lagi data perkembangan PKLnya. Kemarin terakhir, anak UGM juga nyari data kesini.

Permasalahan lain yang juga perlu mendapat perhatian lebih terkait efektifitas program *community relations* seperti yang dijelaskan oleh Iriantara diatas ialah tidak terjadinya kesinambungan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan divisi-divisi yang terdapat di PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil keuntungan dalam bentuk pungutan-pungutan liar yang tidak semestinya. Seperti yang telah disampaikan Amaq Suhaimi, salah seorang Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam *Interview* peneliti pada tanggal 4 Agustus 2016.

“...Disini sering ada pungutan dari petugas. Kadang ada yang minta rokok atau barang dagangan lain, kadang juga dimintai uang listrik dan sewa tempat katanya. Biasanya mereka minta diawal bulan yang nilainya antara 10 hingga 100 rupiah. Dulu saya sempat ikut dagang di Area Relokasi. Tapi sekarang udah tidak lagi, karna banyak pungutan liarnya. Lokasi yang tersisa juga dibagian belakang, jadi susah dapat pembeli.

**Interview* tersebut menggunakan bahasa daerah (sasak) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Hal tersebut jelas bertolak belakang dengan pernyataan Bapak I Wayan Kurma selaku *Airport Security Section Head* yang mengatakan dengan tegas bahwa PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) tidak meminta pungutan dalam bentuk apapun kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Area Relokasi.

“...Tidak ada pungutan sama sekali, semua kita gratiskan. Dari tempat, air bahkan listrik semua gratis. Tapi para PKL masih saja bandel dan susah diatur.

Namun, berbeda dengan dengan Bapak I Wayan Kurma selaku *Airport Security Section Head*, pernyataan yang disampaikan berdasarkan hasil *interview* dengan Bapak Sudjud Muliadi sebagai *SMS, QM & Costumer Service Departement* pada tanggal 2 November 2016 mengakui memang terdapat pungutan liar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“...Sebetulnya terus terang aja tidak ada biaya mas, tapi kenyataannya tim Permata Petak yang ditugaskan itu kadang-kadang minta pungutan dengan jumlah relatif, misalnya pedagang yang ini sekian pedagang satu sekian. Ya termasuk juga pungutan biaya di toilet Bandara seharusnya gk boleh mas. Misalkan ada pungutan untuk penggunaan toilet sebesar dua ribu, seharusnya dari pengguna toilet umum melapor ke kami, karna yang namanya fasilitas umum harus gratis. Sebetulnya untuk proses pengawasan, pengamatan keamanan dan lain-lain juga menjadi tanggung jawab penuh dari Angkasa Pura mas, jadi bukan berarti ketika kita buat MOU dengan Permata Petak Angkasa Pura lepas tangan, salah mas. Karena kita sudah dapat mandat untuk melakukan proses pengawasannya. Tapi ya kita menjalin kerjasama dengan Permata Petak fungsinya hanya sekedar membantu berjalannya program Angkasa Pura.

Ketidaksesuaian informasi antara divisi-divisi yang terdapat pada PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL), Pedagang Kaki Lima

(PKL) dan Permata Petak selaku tim pembantu pengawasan program relokasi perlu ditingkatkan lagi, agar efektifitas program dapat berjalan dengan optimal.

A.1.4. Penilaian (Evaluasi)

Pada proses penilaian atau evaluasi biasanya untuk menilai sejauh mana kegiatan penyelenggaraan dapat berjalan untuk kemudian menentukan solusi ketika terdapat masalah pada tahap implementasi. Penilaian sebagai salah satu fungsi manajemen dapat dilakukan pada saat program sedang berjalan, namun dapat juga dilakukan ketika semua kegiatan telah selesai dijalankan. Manullang menjelaskan pada dasarnya membandingkan antara hasil nyata (aktual) dengan hasil yang diinginkan atau diharapkan. Dengan begitu dapat melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun kegiatan evaluasi (Iriantara, 2004 : 141).

Selain itu tahap penilaian bertujuan untuk memberikan masukan pada perencanaan atau program berikutnya. Fokus penilaian atau evaluasi pada aspek implementasi ini yaitu pada kegiatan atau program yang dijalankan, khususnya dalam pencapaian tujuan program atau kegiatan tersebut. Menurut *SMS, QM & CS Departement Head*, Bapak Sudjud Muliadi berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 13 Juli 2016 sebagai berikut :

‘...Biasanya setelah melakukan kegiatan, kita liat gimana dilapangan mas, ada hasil apa tidak. Kalau belum sesuai ya kita ambil tindakan lagi. Tapi tindakan lanjutan program khususnya penertiban itu bagian pak Kurma, karena itu bidangnya beliau. Tapi ya tetap koordinasi lagi ke saya.

Tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan program relokasi, Bina Lingkungan dan kegiatan-kegiatan bantuan lainnya yang telah atau sedang dijalankan, pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL)

juga tetap melakukan upaya-upaya penertiban yang merupakan bagian evaluasi kegiatan lanjutan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Bandara



Gambar 3.16
Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Bandara 12 Agustus 2014

(Sumber : Arsip PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok)

Surat keputusan yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui *SMS, QM & CS Departement Head* pada tanggal 12 Agustus 2014 tersebut merupakan bentuk kegiatan evaluasi dari program *community relations* berupa relokasi dan Bina Lingkungan yang dijalankan pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional (BIL) yang didasari oleh surat rekomendasi Bupati Lombok Tengah nomor : 520/186/UMUM tanggal 9 September 2013 tentang penataan sarana Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL). Serta berdasarkan surat Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan pedagang Kabupaten Lombok Tengah nomor :

518/316/Koperindag tanggal 10 Juli 2014 perihal rekomendasi pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Adapun tujuan dari surat keputusan tersebut ialah agar Koperasi Serba Usaha (KSU) “Local Transport” untuk segera menjalankan tugasnya dengan konsisten dan bertanggung jawab dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan Bandara Internasional Lombok yang masih berjualan di luar area relokasi.

2. Susunan Anggota Pelaksana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Bandara Internasional Lombok (BIL)

Angkasa Pura | AIRPORTS

No. Agenda : SKSP 1563
Tgl. Terima : 24 - 9 - 14

LEMBAR DISPOSISI
UNIT KERJA

Nomor Surat : SKSP 1563 / 02-03 / 2014 / 1001 / LOP
Tanggal surat : 17 - 9 - 14
Perihal : Susunan Anggota pelaksanaan Penertiban pedagang kaki lima di BIL
Dari : LOP-GM
Untuk : LOP-SM
Kepada Yth.

SAFETY HEALTH & ENVIROMENT SECTION HEAD
 CUSTOMER SERVICES SECTION HEAD
 QUALITY MANAGEMENT SECTION HEAD
 SEKRETARIS

DISPOSISI :

<input type="checkbox"/> Utek	<input type="checkbox"/> Laporkan
<input type="checkbox"/> Proses	<input type="checkbox"/> Ajukan
<input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan	<input checked="" type="checkbox"/> Copy
<input type="checkbox"/> Evaluasi	<input type="checkbox"/> Peratkan
<input type="checkbox"/> Tanggapan	<input checked="" type="checkbox"/> File
<input type="checkbox"/> Saran	

Praya, 25/9/ 2014
SMS, GM & CS DEPARTMENT HEAD
SUDIJO MULADI

Wij Des
Di pilet nca Sri

Gambar 3.17
Susunan Anggota Pelaksana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Bandara Internasional Lombok (BIL) 17 September 2014

(Sumber : Arsip PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok)

Karena dianggap kegiatan *community relations* yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) belum mencapai tujuan yang maksimal, walaupun terdapat perkembangan yang signifikan terhadap

jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berkurang secara drastis dibandingkan sebelum direlokasi. Pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) kembali melakukan upaya penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang masih berdagang di luar area relokasi. Selain itu, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) menganggap susunan keanggotaan tim penertiban sebelumnya belum optimal yang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemudian PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) merasa perlu untuk kembali membuat susunan keanggotaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai salah satu bentuk tindakan evaluasi program seperti yang tercantum pada surat keputusan diatas.

Adapun susunan anggota pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tanggal 17 September 2014 terlampir pada **Gambar 3.18** berikut :

Lampiran Surat Keputusan General Manager
Bandar Udara Internasional Lombok
Nomor : SKEP. 152/OB.03/2014/GM.LOP
Tanggal : 17 September 2014

**SUSUNAN ANGGOTA PELAKSANA PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN DAN KAKI LIMA
DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK**

I. Pengarah	Pujiono	General Manager
II. Pelaksana		
1. Ketua	Sudjud Muljadi	SMS, QM & CS Department Head ✓
2. Anggota	a. Enggar Santoso b. I Ketut Sarjana c. M. Mardiah d. Achmad Chotim e. Gunardi f. Telfan Yudhistira g. Kus Indratno	Safety Health Environment Section Head Customer Service Section Head Airport Fire Fighting & Rescue Section Head Airport Security Section Head Airport Service Section Head CSR Section Head Property & Adv. Section Head

Diterapkan di : Praya
Pada tanggal : 17 September 2014

GENERAL MANAGER
PT ANGKASA PURA AIRPORTS
Bandar Udara Internasional Lombok
PUJIONO

Gambar 3.18

**Susunan Anggota Pelaksana Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di
Bandara Internasional Lombok (BIL)
(Sumber : Arsip PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok)**

3. Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui *SMS, QM & CS Departement* selaku ketua tim pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan hasil pantauan yang telah dilakukan sehubungan dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan hasil evaluasi terhitung sejak Oktober 2014 hingga tanggal 18 November 2014.



Gambar 3.19

**Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) 18 November 2014
(Sumber : Arsip PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok)**

Adapun tindakan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) yang telah dilakukan seperti yang dimaksudkan di atas ialah :

- a. Pembentukan tim berdasarkan surat keputusan *General Manager* PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) Nomor SKEP.158/OB.03/2014.GM.LOP.

- b. Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Pengelolaan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Ziarah dan Koperasi Serba Usaha (KSU) BIL “Local Product”.

Hasil evaluasi yang diperoleh dari pantauan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) sebagai *SMS, QM & CS Departement* sebagai berikut :

- a. Sampai dengan saat ini pengelola lapak berdasarkan rekomendasi dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Lombok Tengah yaitu KSU Ziarah dan KSU “Local Transport” masih belum maksimal.
- b. Sehingga sampai saat ini masih banyak terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di depan lobby keberangkatan, terutama di depan Solaria dan selasar.
- c. Laporan *SMS, QM & CS Departement Head* selaku ketua tim pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) kepada *General Manager* Nomor LOP.SM279/OB.03/XI/2014 tanggal 5 November 2014 terkait dengan ketidakhadiran anggota pengelola di terminal atau tidak pernah melakukan penertiban sebagaimana mestinya sesuai dengan risalah rapat tanggal 1 Oktober 2014.

Berdasarkan hasil evaluasi yang jelaskan tersebut, maka *SMS, QM & CS Departement* merekomendasikan atau menyarankan agar :

- a. Para anggota pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) agar hadir setiap saat untuk melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan Bandara.
 - b. Mengkaji ulang pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada saat ini.
 - c. Perlu adanya SOP antara pihak Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL).
4. Penandatanganan MOU dengan 3 Kepala Desa



Gambar 3.20

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan 3 Kepala Desa 28 Januari 2015

(Sumber : lombok-Airport.co.id)

Akibat dianggap pengelolaan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) belum maksimal, pada tanggal 28 Januari 2015 pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) melaksanakan perjanjian Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Bandara Internasional Lombok (BIL) yang diwakili oleh Pujiono, selaku *General Manager* dengan Persatuan

Masyarakat Tiga Desa (Permata Petak) yang diwakili oleh Kepala Desa Penujak, Kepala Desa Tanak Awu dan Kepala Desa Ketara. Memorandum Of Understanding (MOU) tersebut dilaksanakan dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Bandara Internasional Lombok (BIL), dimana dengan adanya Memorandum Of Understanding (MOU) ini penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan dapat lebih optimal sehingga Bandara Internasional Lombok (BIL) akan “Bersih Indah Lestari” lebih cepat dicapai sebagaimana tujuan yang diinginkan oleh pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL).

Seperti yang telah dijelaskan pada sub BAB tahap perencanaan, Persatuan Masyarakat Tiga Desa (Permata Petak) merupakan bagian pengamanan masyarakat yang melibatkan 3 Desa Lingkar Bandara, walaupun hasil awal yang dicapai dengan pengamanan Persatuan Masyarakat Tiga Desa (Permata Petak) tersebut masih belum maksimal, namun pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) masih meyakini bahwa penggunaan Persatuan Masyarakat Tiga Desa (Permata Petak) sebagai bantuan pengaman terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat lebih optimal. Hal ini dikarenakan anggota Persatuan Masyarakat Tiga Desa (Permata Petak) yang tergabung di dalamnya merupakan warga asli dari tiga Desa yang berada di kasawasan Lingkar Bandara, tentunya pendekatan secara persuasif akan lebih mudah untuk dilakukan. Terlebih Persatuan Masyarakat Tiga Desa (Permata Petak) melibatkan secara langsung orang-orang yang dituakan oleh

masyarakat Desa Tanak Awu, Penujak maupun Ketara khususnya para Kepala Desa.

5. Permohonan Perpanjangan Kerjasama Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Permata Petak.

Gambar 3.21

Permohonan Perpanjangan Kerjasama Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Permata Petak 12 Januari 2016

(Sumber : Arsip PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok)

PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui *SMS, QM & CS Department Head* yang mendasari Memo Intern *Airport Security Section Head* tanggal 8 Januari 2016 kembali melaksanakan permohonan perpanjangan bantuan kerjasama dengan Persatuan Masyarakat Tiga Desa (Permata Petak) perihal bantuan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Bandara Internasional Lombok (BIL)

Adapun isi Memorandum Of Understanding (MOU) yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2016 tersebut mengenai permohonan perpanjangan bantuan kerjasama oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan Persatuan Masyarakat Tiga Desa (Permata Petak) disertai permintaan 26 orang anggota pengamanan dari Persatuan Masyarakat Tiga Desa (Permata Petak).

PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) telah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perangkat pemerintahan dari berbagai tingkatan. Hal ini menunjukkan upaya PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk dapat menyelesaikan permasalahan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan Bandara Internasional Lombok (BIL). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sudjud Muliadi sebagai *Safety Management System, Quality Management & Costumer Service Departement* pada tanggal 13 Juli 2016 sebagai berikut :

‘...Kemungkinan untuk program pengamanan PKL di BIL, Permata Petak yang terakhir. Itu bagian dari upaya pengamanan sebelum direlokasi kembali pada akhir tahun ini ke tempat yang lebih baik dan kita sudah wacanakan ke Pak GM. Karena tempat yang sekarang itu terlalu dekat dengan area keberangkatan dan kedatangan pesawat mas. Sedangkan untuk biaya oprasinal dari kerjasama dengan Permata Petak ini nilai nominalnya tidak sedikit mas, jumlahnya mencapai 42 juta rupiah untuk sekitar 26 anggota Permata Petak setiap bulannya.

B. ANALISIS DATA

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, hubungan yang dijalin oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan masyarakat Lingkar Bandara khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di lingkungan Bandara Internasional Lombok (BIL) merupakan suatu bentuk usaha yang diperuntukkan agar dapat membentuk dan memelihara hubungan yang baik antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Dalam implementasi kegiatan yang dilakukan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam upanya untuk menertibkan permasalahan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan Bandara Internasional Lombok (BIL). Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan *community relations* yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) ialah menjadikan kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) sebagai kawasan yang aman, nyaman dan tertib seperti yang sudah dijelaskan pada hasil wawancara peneliti. Kegiatan-kegiatan *community relations* yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) merangkum beberapa aspek peningkatan peran kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan tujuan kegiatan *community relations* yang dikemukakan oleh Frazier Moore antara lain :

- a. Menjadikan perusahaan sebagai salah satu faktor penting yang dapat berperan aktif dalam pemberdayaan kelompok masyarakat.
- b. Meningkatkan kesehatan komunitas dengan mendukung berbagai program kesehatan setempat.

- c. Meyakinkan kepada masyarakat bahwa keberadaan perusahaan akan dapat membawa manfaat bagi keberlangsungan kehidupan komunitas.
- d. Menjaga hubungan yang baik dengan komunitas dalam semangat kebersamaan yang tinggi (Moore, 1988 : 76-77).

Berdasarkan definisi dan pendapat Moore tersebut, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) telah melakukan upaya yang aktif dengan masyarakat Lingkar Bandara melalui kegiatan *community relations* diantaranya memberikan dana bantuan Bina Lingkungan, kesehatan, fasilitas keagamaan dan penyediaan area relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

B.1. Perencanaan

McLaughlin menjelaskan perencanaan merupakan proses penentuan terlebih dulu tentang apa yang harus dilakukan oleh organisasi sebagai satu kesatuan kemudian menentukan bagian atau personel yang berada di dalamnya dengan satu pandangan untuk mencapai objektif organisasi (Iriantara, 2004 : 102). Jadi pada dasarnya perencanaan merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan organisasi atau perusahaan.

PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam menjalankan program *community relations* baik dalam bentuk relokasi dan program Bina Lingkungan juga melakukan proses perencanaan yang baik. Perencanaan dilakukan agar dapat menyusun program yang sesuai dengan tujuan program tersebut. Perencanaan juga dapat difungsikan untuk memilah antara program yang tepat atau kurang tepat untuk dijalankan. Tahap perencanaan dilakukan dengan

melalui proses survei terlebih dulu untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL). Namun, meskipun PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui bidang-bidang kerjanya telah melalui proses survei lapangan untuk menjalankan program, perlu juga dalam proses perencanaan tersebut melakukan analisis situasi yang berfungsi untuk menggambarkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Hal ini oleh peneliti juga dianggap perlu dilakukan karena penyusunan program *community relations* mempunyai tujuan untuk mencapai keberhasilan perusahaan yang tidak hanya dimasa sekarang, namun juga jangka panjang. Adapun analisis situasi yang perlu dilakukan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam menyusun program *community relations* sebagai berikut :

1. Kekuatan (*strengths*) : Bandara Internasional Lombok (BIL) merupakan satu-satunya Bandara komersial yang berada di Pulau Lombok. Segala bentuk aktifitas kedatangan ataupun keberangkatan dari maupun keluar Pulau Lombok yang melalui jalur udara, sudah pasti akan menggunakan Bandara Internasional Lombok (BIL). Terlebih Bandara Internasional Lombok (BIL) merupakan Bandara yang bertaraf Internasional. Dalam hal penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) memiliki kekuatan untuk “memaksa” dalam arti memiliki payung hukum untuk menjalankan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut. Disamping itu, PT Angkasa Pura

Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) juga memiliki sumber daya manusia yang ahli dan profesional untuk melakukan pendekatan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) agar efektifitas program dapat terjaga.

2. Kelemahan (*weakness*) : Letak Bandara Internasional Lombok (BIL) secara geografis berada di kawasan yang jauh dari kota. Hal ini akan menyulitkan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak atau institusi yang terlibat dalam proses pelaksanaan program *community relations* yang dijalankan.

Selain itu aspek budaya juga perlu diperhatikan. Terletak di kawasan yang jauh dari lingkungan perkotaan, menjadikan masyarakat sekitar masih memegang teguh budaya serta adat istiadat yang sekaligus dijadikan aturan. Tentu hal ini menyulitkan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam menjalankan program dikarenakan masyarakat masih tertutup terhadap hal-hal yang bersifat *modernitas*. Jadi, dibutuhkan adanya penyesuaian program dengan adat istiadat masyarakat sekitar.

3. Peluang (*opportunities*) : Bandara Internasional Lombok (BIL) merupakan sarana prasarana transportasi umum yang bersifat vital dan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Akibat dari kebutuhan masyarakat tersebut, akan memunculkan tuntutan masyarakat secara umum terhadap fasilitas Bandara yang aman, nyaman dan bersih. Untuk itu, dalam pelaksanaan program penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) secara langsung ataupun tidak akan didukung juga oleh masyarakat secara umum

guna tercapainya suasana Bandara Internasional Lombok (BIL) yang aman, nyaman dan bersih.

4. Ancaman (*threats*) : Masyarakat Lingkar Bandara merupakan masyarakat adat sebagaimana biasanya yang rawan terlibat konflik. Ketika mereka menganggap terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, penyelesaian secara kekerasan (perang) lebih diutamakan dibanding upaya mediasi. Hal tersebut terbukti ketika pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang menimbulkan konflik berdarah.

Apabila proses perencanaan program *community relations*, dalam hal ini program Bina Lingkungan dan Relokasi telah didasari pada proses analisis situasi seperti yang telah dijelaskan, maka pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) akan mampu menyusun program jangka pendek ataupun jangka panjang yang tepat dan sesuai.

Selain itu, perencanaan program belum dibuat dengan maksimal disebabkan tidak terdapatnya penjadwalan program secara baik. Seperti yang dijelaskan oleh McLAughlin bahwa perencanaan program secara umum terbagi menjadi program jangka pendek dan program jangka panjang. Rencana jangka pendek biasanya rencana yang dibuat berjangka waktu hingga 12 bulan dengan merinci pada pembuatan rencana secara strategis. Sedangkan rencana jangka panjang merupakan rencana yang dibuat dengan jangka waktu 3 hingga 10 tahun (Iriantara, 2004 : 102).

PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) belum melakukan perencanaan dengan maksimal. Hal ini terbukti bahwa PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) tidak memiliki *time table* kegiatan

yang sesuai dengan penjelasan diatas. Program *community relations* yang dilakukan hanya berdasarkan hasil evaluasi lapangan ketika program tidak berjalan lancar. Walaupun dalam menjalankan program juga dapat bersifat *fleksibel*, artinya tidak harus sesuai dengan rencana melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan ketika program tidak berjalan sesuai rencana. Namun, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) seharusnya membuat *time table* rencana program sehingga program yang akan diimplementasikan akan berjalan lebih optimal.

Menurut analisa peneliti, tahap perencanaan yang merupakan langkah awal sebelum terlaksana dalam proses implementasi kegiatan pada program *community relations* khususnya pada program relokasi dan Bina Lingkungan, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam upayanya menyelesaikan permasalahan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berusaha untuk fokus terhadap masyarakat lingkaran tiga Desa seperti Desa Tanak Awu, Ketara dan Penujak yang merupakan masyarakat yang terkena imbas secara langsung terhadap keberadaan Bandara Internasional Lombok.

Seperti yang telah di bahas pada bab pertama, Bandara Internasional Lombok (BIL) berdiri di atas lahan masyarakat tiga Desa yang diakuisisi oleh pemerintah daerah untuk keperluan pembangunan Bandara baru yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL). Hal tersebut menjadi salah satu alasan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk membuat program *community relations* yang diharapkan mampu membantu dan memberikan sarana prasana untuk masyarakat ling tiga Desa dapat

berdagang dan tumbuh mandiri tanpa menyalahgunakan Bandara sebagai tempat mencari nafkah.

B.2. Pengorganisasian

Pengorganisasian pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan, namun peneliti ingin menggambarkan dengan lebih detail tentang tahap pengorganisasian yang dijalankan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL). Kegiatan pengorganisasian yang telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam menyusun tim pelaksana kegiatan yang ditugaskan untuk menjalankan program *community relations* sudah sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh George R. Terry bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan dasar manajemen yang dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber daya yang diisyaratkan dalam rencana, sehingga kegiatan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Justin G. Longenecker bahwa pengorganisasian sebagai aktivitas menetapkan hubungan antara manusia dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan (Iriantara, 2004 : 126).

Dalam menyusun pengorganisasian yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tahap perencanaan dapat dikategorikan baik karena sudah sesuai dengan beberapa penjelasan yang terdapat pada teori. Hal ini tergambar ketika PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) menyusun sumber daya manusia sebagai pelaksana

tugas yang ada berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing bagian yang terdapat di dalam struktur organisasi perusahaan.

Community relations berhadapan langsung dengan persoalan-persoalan sosial nyata yang terdapat di lingkungan komunitas sekitar organisasi. Untuk itulah diperlukan adanya kerjasama antara perusahaan dan masyarakat sekitar untuk dapat mengidentifikasi, mencari solusi dan melaksanakan rencana tindakan untuk mengatasi permasalahan guna tercapainya kemaslahatan bersama (Iriantara, 2004 : 79). Hal ini sesuai ketika PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam proses pengorganisasian melibatkan banyak lapisan masyarakat dan institusi dinas terkait. Pembentukan tim pelaksana kegiatanpun dilakukan dengan selalu membuat pembaharuan dalam susunan tim pelaksana kegiatan tersebut.

Selain itu diperlukan adanya kejelian untuk dapat membuat susunan pengorganisasian agar hasil dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Aspek komunikasi dengan organisasi dalam hal ini masyarakat sekitar daerah operasional perusahaan juga seharusnya mendapat perhatian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program *community relations*. Aspek komunikasi dengan masyarakat dalam pelibatangannya dalam kegiatan dimaksudkan agar perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dari masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ley tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi dengan komunitas sebagai berikut :

1. Cara terbaik membangun komunikasi dengan komunitas adalah dengan melibatkan anggota-anggota komunitas.
2. Memberi peluang bagi para sukarelawan.

3. Mengajak berbagai komunitas.
4. Melibatkan wakil organisasi dalam kegiatan komunitas
5. Mengajak pihak penentang untuk berdialog, karena bisa saja pihak penentang tersebut menjadi pemberi saran yang penting dan memberikan informasi yang berharga (Iriantara, 2004 : 113)

Dalam proses pengorganisasian, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) sudah menyadari akan pentingnya aspek komunikasi dalam proses pengorganisasian walaupun dalam penerapannya belum berjalan maksimal.

Selain itu, jika diamati dari Sumber Daya Manusia (SDM) internal perusahaan yang terdapat pada PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) efektifitas program *community relations* yang dijalankan belum secara signifikan berjalan dengan optimal dikarenakan salah satu penyebabnya disiplin ilmu Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) masih didominasi oleh lulusan dengan disiplin ilmu hukum, ekonomi, teknik penerbangan, teknik informatika, komputer, pariwisata, ekonomi, administrasi publik, perpajakan, teknik industri, sains terapan, bahkan terdapat juga lulusan dari program D3. Hal ini tentu akan mempengaruhi efektifitas program *community relations*, terlebih tidak terdapat lulusan dengan disiplin ilmu komunikasi khususnya pada bidang *Public Relations*. Padahal, disiplin ilmu komunikasi *Public Relations* sangatlah diperlukan ketika akan membuat program yang kaitannya dengan publik sebagai *stakeholder*.

B.3. Implementasi

Setelah melalui proses perencanaan, langkah selanjutnya dalam pelaksanaan program *community relations* ialah dengan mengimplementasikan program tersebut. Implementasi menurut Wheleen dan Hunger pada dasarnya merupakan himpunan kegiatan dan pilihan yang diperlukan untuk menjalankan rencana. Implementasi juga merupakan proses menjabarkan strategi dan kebijakan ke dalam tindakan dengan mengembangkan program, anggaran dan prosedur (Iriantara, 2004 :123-124).

Berdasarkan dari penjabaran tersebut, menjelaskan bahwa dalam proses implementasi kegiatan tentunya terdapat beberapa kepentingan dari masing-masing program yang telah direncanakan, hal ini diperlukan agar nantinya dapat meminimalisir program-program yang kurang tepat serta kurang bermanfaat bagi perusahaan. Menurut analisis peneliti, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam melakukan proses implementasi telah sesuai dengan beberapa point dalam teori. Namun terdapat juga ketidaksesuaian dalam proses implementasi program *community relations* khususnya pada program relokasi dan dana Bina Lingkungan yang menyebabkan hingga saat ini masih terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di luar tempat yang sudah disediakan.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menjalankan implementasi program *community relations* ialah menganalisa publik sebagai sasaran program tersebut. Langkah-langkah dalam melakukan implementasi program *community relations* menurut Brown antara lain :

1. Segmentasi

Penentuan segmentasi dari suatu program *community relations* dilihat berdasarkan publik sebagai sasaran program. Organisasi atau perusahaan tidaklah berhubungan hanya dengan komunitas tunggal saja, melainkan melibatkan sejumlah komunitas yang berbeda-beda. Komunitas tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan batasan demografis, ikatan etnis atau agama, seni, bisnis dan lingkungan (Iriantara, 2004 : 89).

Berdasarkan penjelasan tersebut organisasi perusahaan dalam menjalankan program sudah seharusnya mempertimbangkan beberapa perbedaan yang terdapat di lapisan masyarakat. Dalam hal ini PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) belum menggunakan segmentasi dalam menjalankan program *community relations*. Sebagai contoh pada program keagamaan Bina Lingkungan, dari data yang diperoleh peneliti PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) hanya terfokus melakukan program *community relations* kepada masyarakat yang beragama Islam saja. Seperti pembangunan dan pemeliharaan fasilitas masjid, buka puasa bersama ataupun kegiatan pemberian santunan Idul Fitri. Padahal, masyarakat Lingkar Bandara terdapat juga yang non muslim walaupun dalam jumlah yang tidak banyak (minoritas). Hal ini yang kemudian dapat disimpulkan oleh peneliti jika PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) belum menjalankan segmentasi program *community relations* dengan maksimal.

2. Skala Prioritas

Dari sekian banyak komunitas yang terdapat di lingkungan organisasi perusahaan, harus dipilih kelompok atau komunitas mana yang menjadi sasaran prioritas program *community relations* perusahaan. Pertimbangan prioritas tersebut biasanya didasarkan pada komunitas yang paling memiliki kekuatan untuk mendukung atau menghambat tujuan organisasi atau perusahaan (Iriantara, 2004 : 89).

Penetapan skala prioritas merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu program *community relations*. Akan tetapi menurut analisis peneliti, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) belum secara optimal menerapkan skala prioritas pada program *community relations*. Permasalahan utama yang terjadi di lingkungan Bandara Internasional Lombok (BIL) ialah tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak semestinya berdagang di lingkungan Bandara. Hal ini menegaskan bahwa skala prioritas yang harusnya menjadi fokus dari PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) adalah masyarakat yang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Upaya relokasi sebagai salah satu program *community relations* yang dipilih oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) memang sudah terfokus kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) saja. Namun pada program Bina Lingkungan tidak menunjukkan adanya skala prioritas perusahaan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Padahal,

berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Bapak Sudjud Muliadi mengatakan bahwa kegiatan Bina Lingkungan juga diperuntukkan agar Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak lagi berjualan di lingkungan Bandara. Namun pada penerapannya, tidak terdapat program Bina Lingkungan yang langsung tertuju kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai skala prioritas program.

Program Bina Lingkungan menysasar kepada masyarakat tiga desa yaitu desa Tanak Awu, Penujak dan Ketara. Walaupun Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di lingkungan Bandara Internasional Lombok (BIL) merupakan masyarakat tiga desa tersebut, namun hal ini belum menunjukkan penerapan skala prioritas program sebagaimana yang terdapat pada teori.

Selain itu, peneliti tidak menemukan kegiatan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) secara khusus dalam hubungan dengan pers (media massa), meskipun belum ditemukannya masalah dari hal tersebut namun ini menunjukkan adanya ketidaksesuain pada teori dengan pelaksanaan program bahwa *Public Relations* dalam menjalankan peranannya termasuk program *community relations* harus juga memperhatikan hubungan yang baik dengan media massa. Berdasarkan yang disampaikan oleh Darmastuti dalam buku *Media Relations (Konsep, Strategi & Aplikasi)* bahwa dalam pekerjaan seorang *Public Relations*, media massa mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat, baik pengaruh positif maupun pengaruh

negatif. Media massa dapat digunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar membangun citra positif bagi individu, organisasi, perusahaan bahkan negara (Darmastuti, 2012 : 29).

Berdasarkan penjelasan tentang pers sebagai salah satu aspek penting dalam menjalankan program, sudah seharusnya PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) memanfaatkan dan menjaga hubungan dengan media massa untuk meningkatkan citra positif perusahaan dimata masyarakat. Hal ini dianggap penting oleh peneliti karena pengguna angkutan transportasi udara yang melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) merupakan *stakeholder external* bagi PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL), dengan begitu citra positif yang ada pada PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) akan terbentuk dan terjaga.

Dalam menjalankan program, diharapkan adanya kerjasama dalam hal interaksi sosial yang selaras berkesinambungan serta saling menguntungkan antara masyarakat dengan perusahaan guna mencapai tujuan program (Kasali, 1994 : 139). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) belum dapat memaksimalkan peranannya dalam proses pelaksanaan kegiatan. Interaksi yang selaras dan berkesinambungan tidak tergambar ketika masih terdapat oknum-oknum yang mengambil pungutan liar dari Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti yang telah disampaikan Amaq Suhaimi, salah seorang Pedagang Kaki Lima (PKL)

Hal tersebut jelas bertolak belakang dengan pernyataan Bapak I Wayan Kurma selaku *Airport Security Section Head* yang mengatakan dengan tegas bahwa PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) tidak meminta pungutan dalam bentuk apapun kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Area Relokasi.

Walaupun demikian, peneliti menyadari bahwa ketidakselarasan tersebut disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, namun PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam hal ini juga perlu mengatasi permasalahan yang berada diinternal perusahaannya agar tercipta kesesuaian antara masyarakat dan perusahaan guna tercapainya tujuan dari program *community relations* sebagaimana yang dijelaskan oleh Kasali.

B.4. Pengawasan

Kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan terhadap program *community relations* yang sedang berjalan belum optimal dilakukan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) khususnya *Airport Security Section Head* dan Persatuan Masyarakat Tiga Desa (Permata Petak) sebagai tim pengawas yang ditunjuk oleh perusahaan. Hal ini terbukti ketika program *community relations* dalam bentuk relokasi yang dimaksudkan agar tidak lagi terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di luar area tersebut. Namun nyatanya, Pedagang Kaki Lima (PKL) masih saja lepas dari pengawasan petugas dan masuk untuk berjualan di area parkir dan lokasi-lokasi lain yang tidak semestinya.

Menurut analisis peneliti yang didapat dari beberapa hasil *interview* dengan pihak dari PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) hal ini disebabkan karena pengawasan yang dilakukan oleh Permata Petak hanya sampai pada jam 9 malam, padahal aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memasuki dan berjualan di area Bandara hingga ketika Bandara Internasional Lombok (BIL) akan ditutup yaitu pada jam 10 hingga 11 malam, sehingga kinerja dan hasil yang didapatkan menjadi kurang maksimal.

Menurut Manullang, bahwa pengawasan merupakan proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilakukan, menilai pekerjaan tersebut dan mengoreksinya bila diperlukan dengan maksud agar pelaksanaan program sesuai rencana. Sedangkan tujuan dari pengawasan adalah untuk mengusahakan apa yang direncanakan bisa menjadi kenyataan (Iriantara, 2004 : 138). Berkaitan dengan penjelasan tersebut, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) khususnya *Airport Security Section Head* dan Persatuan Masyarakat Tiga Desa (Permata Petak) dalam hal ini telah menjalankan proses pengawasan dengan baik, terbukti dengan setiap hari melakukan upaya pengawasan dengan mempersuasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah berada di Area Relokasi untuk menjaga kebersihan dan juga menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tertangkap berjualan di luar Area Relokasi walaupun dengan hasil yang belum optimal.

Namun ketua koordinator tim pengawas juga seharusnya turun langsung ke lapangan untuk melihat efektifitas dari program yang sedang berjalan, bukan hanya mendengarkan dari hasil laporan anggota, masyarakat atau karyawan lainnya.

Fungsi lain dari koodinator tim pelaksana pengawasan turun ke lapangan ialah untuk mengontrol serta mencocokkan antara laporan yang disampaikan dengan keadaan nyata dilapangan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana program seperti masalah pungutan liar yang terjadi saat ini. Hal ini sesuai dengan rekomendasi program pengawasan yang disampaikan oleh Wheelen dan Hunger, diantaranya :

1. Pengawasan sebaiknya hanya berkenaan dengan jumlah minimal informasi yang dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang terpercaya tentang kegiatan. Terlalu banyak informasi malah membingungkan.
2. Pengawasan sebaiknya hanya dilakukan dengan memantau kegiatan atau hasil kegiatan yang bermakna.
3. Pengawasan hendaknya dilakukan tepat waktu sehingga tindakan korektif bisa dilakukan sebelum terlambat (Iriantara, 2004 : 140).

Selain itu, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam hal pengawasan terhadap program yang telah dijalankan seperti pemberian bantuan dana beasiswa, puskesmas keliling dan berbagai program bantuan lainnya melakukan pengawasan untuk menilai sejauh mana efektifitas program yang telah dilakukan dengan cara terjun dan mencari informasi secara langsung kepada dinas-dinas atau instansi terkait yang berkaitan dengan program tersebut. Sebagai contoh pada program bantuan dana beasiswa untuk masyarakat lingkak Bandara mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA pihak PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) berkoordinasi dengan instansi pendidikan daerah untuk menilai dana yang diberikan sudah tepat sasaran atau malah sebaliknya. Sedangkan untuk

program kesehatan, PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah untuk menentukan target desa-desa yang memang membutuhkan bantuan kesehatan dan selanjutnya menilai keberhasilan program dengan melihat perkembangan yang dilaporkan oleh dinas kesehatan daerah, selain tentunya PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) juga meninjau secara langsung proses program kesehatan yang sedang dan telah dilaksanakan.

B.5. Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang menurut Steele adalah proses penilaian secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau ketepatan sesuatu berdasarkan kriteria dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Lindenmann menjelaskan evaluasi dimaksudkan untuk menentukan efektifitas relatif sebuah program, kegiatan atau strategi *Public Relations* dengan mengukur keluaran (*output*) atau dampak (*outcome*) program, kegiatan atau strategi tersebut berdasarkan sejumlah tujuan (*objective*) yang sudah ditetapkan sebelumnya (Iriantara, 2004 : 147-148).

Beberapa program yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL), baik dalam bentuk program relokasi dan Bina Lingkungan sudah mendekati seperti yang disampaikan Iriantara di atas. Contohnya pada program bantuan penyediaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), *output* yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui *Finance and IT Departement Head* menyiapkan 483 unit MCK untuk Desa Ketare dan sebanyak 94 unit MCK untuk Desa Tanak Awu

dengan total dana mencapai Rp 45.000.000. Dampak program (*outcome*) yang dirasakan oleh masyarakat juga positif, terbukti dengan Desa Ketare menjadi salah satu Desa percontohan sebagai Desa dengan kualitas MCK yang baik pada tahun 2015.

Proses terakhir dalam pelaksanaan suatu program adalah evaluasi. sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam proses evaluasi hendaknya dilakukan dengan mendasarkan pada aspek tujuan yang ingin dicapai dan ketepatan suatu program yang dilakukan. Selain itu evaluasi program *community relations* dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap pencapaian tujuan atau perwujudan visi dan misi organisasi, dalam hal ini adalah menempatkan evaluasi dalam konteks manajemen organisasi secara keseluruhan dan bukan dalam konteks manajemen satu program yang dijalankan organisasi. Program *community relations* dievaluasi kontribusi dan keterkaitannya pada tujuan umum (*goal*) dan tujuan khusus (*objective*) organisasi (Iriantara, 2004 : 156).

Berdasarkan hasil analisis peneliti, tahap evaluasi yang dilakukan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) sudah mendekati dari apa yang disampaikan Yosol Iriantara dalam bukunya yang berjudul *Community Relations- Konsep dan Aplikasinya*, karena evaluasi yang dilakukan telah dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu program dengan didasarkan pada indikasi-indikasi tertentu, yakni tingkat ketepatan suatu program untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan dan bukan hanya terfokus pada tujuan dari pelaksanaan program tersebut.

Namun dalam aspek lain PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam menjalankan tahap evaluasi juga masih terdapat tindakan yang belum optimal seperti jumlah arsip dan kelengkapan data hasil implimentasi program yang minim. Salah satu penyebabnya ialah ketika terjadi rotasi (*reshuffle*) keanggotaan internal perusahaan, maka tim pelaksana program *community relations* sebelumnya tidak secara *detail* memberikan arsip tentang kegiatan tersebut, selain juga terkadang tidak membuat hasil evaluasi secara keseluruhan atau berjangka panjang seperti yang disampaikan Bapak Sudjud Mulyadi. Hal ini tentu kurang sesuai dengan proses evaluasi dalam teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.